
MAREPDEP KA LAGGAI SIBURUK: RELOKASI BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI MENTAWAI

Intan Violetta¹, Sri Setiawati², Zainal Arifin³

1.2.3. Program Studi Antropologi, Universitas Andalas Padang-Indonesia

Korespondensi: intanvioletta777@gmail.com

Abstract: The earthquake and tsunami that hit the Mentawai Islands Regency 12 years ago still leaves its mark. The tsunami that hit several hamlets, particularly in North Pagai Island and South Pagai Island, required the community to participate in the government's relocation program. Sabeuggungung Hamlet in Betumonga Village is one of the hamlets participating in the relocation. This paper wants to explore the cultural experience of the Sabeugungung shelter community as well as those who choose to return to laggai. The research location is at the Sabeuggung shelter KM.14 Jalan Poros Pagai Utara. The method used is life story and participatory observation using the ethnoscience paradigm. The findings show there are several things that make residents stay in the refugee camps as well as choose to go back and forth between laggai-huntap, including trauma, economic pressure and their ancestral plantations. There are people who are still too traumatized to return to laggai and who survive by finding new jobs in the shelter. There are people who are still traumatized, but due to economic pressure in the shelters they are forced to return to laggai to cultivate their fields there. And there are also people who live in shelters, have a livelihood in shelters but want to return because of cultural ties to laggai. Another factor that becomes a problem in the shelter residence is that until now the community has not received a land or residence certificate as a form of legality for them to live there.

Keywords: *Disaster Relocation, Community View, Mentawai, North Pagai*

Abstrak: Gempa dan tsunami yang melanda Kabupaten Kepulauan Mentawai 12 tahun lalu masih membekas. Tsunami melanda beberapa dusun, khususnya di Pulau Pagai Utara dan Pulau Pagai Selatan, menuntut masyarakat untuk ikut serta dalam program relokasi pemerintah. Dusun Sabeuggungung di Desa Betumonga merupakan salah satu dusun yang ikut relokasi. Tulisan ini ingin menggali pengalaman budaya masyarakat shelter Sabeugungung serta mereka yang memilih kembali ke laggai. Lokasi penelitian berada di Halte Sabeuggung KM.14 Jalan Poros Pagai Utara. Metode yang digunakan adalah life story dan observasi partisipatif dengan menggunakan paradigma etnosains. Temuan menunjukkan ada beberapa hal yang membuat warga bertahan di pengungsian sekaligus memilih bolak-balik laggai-huntap, antara lain trauma, tekanan ekonomi dan perkebunan leluhur mereka. Ada orang yang masih terlalu trauma untuk kembali ke laggai dan bertahan hidup dengan mencari pekerjaan baru di tempat penampungan. Ada warga yang masih trauma, namun karena desakan ekonomi di pengungsian terpaksa kembali ke laggai untuk menggarap ladangnya di sana. Dan ada juga masyarakat yang tinggal di pengungsian, memiliki mata pencaharian di pengungsian namun ingin kembali karena ikatan budaya dengan laggai. Faktor lain yang menjadi permasalahan di tempat tinggal shelter adalah hingga saat ini masyarakat belum mendapatkan sertifikat tanah atau tempat tinggal sebagai bentuk legalitas mereka untuk tinggal di sana.

Kata Kunci: *Relokasi Bencana, Pandangan Masyarakat, Mentawai, Pagai Utara*

A. Pendahuluan

Tanggal 25 Oktober 2010, gempa bumi berkekuatan 7,2 skala *Richter* mengguncang Kabupaten Kepulauan Mentawai. Gempa terjadi pada pukul 21.42 WIB tersebut membawa serta gelombang tsunami setinggi 3-7 m yang menyapu sampai sejauh 1 Km ke daratan. Gempa yang terjadi pada malam hari yang kemudian disusul gelombang tsunami membuat banyak masyarakat tidak siap untuk menyelamatkan diri. Akibat gempa dan tsunami tersebut ada 4 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang terdampak yaitu Kecamatan Sipora Selatan, Kecamatan Pagai Selatan, Kecamatan Pagai Utara, dan Kecamatan Sikakap.

Menurut Laporan BNPB dan BAPPENAS Kabupaten Kepulauan Mentawai 2011-2013, pada tanggal 15 Desember 2010 bertempat di rumah Dinas Gubernur Sumatera Barat, dilakukan rapat koordinasi antara BNPB dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Rapat tersebut menyepakati perpanjangan kembali masa tanggap darurat sampai 31 Desember 2010. Pertimbangannya adalah untuk menambah pembangunan hunian sementara yang jumlahnya belum memadai. Selain itu untuk memastikan pendistribusian logistik telah menjangkau seluruh korban bencana.

Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana pada dasarnya bertujuan untuk membangun dan menata ulang kembali kehidupan sosial-ekonomi dan lingkungan alam masyarakat yang terdampak bencana lebih baik dari sebelumnya. Harapannya masyarakat yang terdampak dapat bangkit dari keterpurukan sosial-ekonomi terutama korban bencana gempa bumi dan tsunami Mentawai 2010. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan pasca gempa bumi dan tsunami Mentawai harus berdasarkan dengan amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007. Pada pasal 32 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa pemerintah dapat menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman dan/atau mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan perseorangan atas suatu benda sesuai peraturan dan perundang-undangan.

Relokasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) adalah pemindahan tempat dari suatu lokasi ke lokasi lain. Sementara menurut Kementerian Pekerjaan Umum relokasi adalah pemindahan sebagian atau seluruh aktivitas, sarana dan prasarana dari suatu tempat ke tempat yang lain guna mempertinggi faktor

keamanan, kelayakan, legalitas, pemanfaatan dengan tetap memperhatikan lingkungan alami di tempat tujuan (Hadi, 2018). Adapun pemindahan yang dilakukan tidak hanya untuk pemukiman saja tetapi juga pada aspek yang lainya seperti pemindahan sekolah, rumah ibadah, fasilitas kesehatan bahkan sumber ekonomi masyarakat.

Tempat relokasi pemukiman yang akan dibangun kembali itu disebut dengan *huntap* atau hunian tetap. *Huntap* ditujukan kepada korban bencana yang perkampungan mereka berada di kawasan rawan bencana. *Huntap* dibangun oleh pemerintah secara permanen di lokasi yang telah ditentukan berdasarkan Undang-Undang Kebencanaan. Penyediaan sarana dan prasarana lainnya juga disebutkan dalam Undang-Undang seperti air bersih, sanitasi, fasilitas pendidikan, kesehatan dan juga keagamaan. Sebagai daerah yang masih mengalami ketertinggalan pembangunan, maka dalam perencanaan pembangunan *huntap* di lokasi relokasi bencana gempa dan tsunami Mentawai 2010 diharapkan dapat mengeluarkan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai daerah tertinggal.

Setelah dilakukan pemetaan kawasan rawan bencana, seluruh dusun-dusun tersebut diputuskan untuk direlokasi ke tempat yang lebih aman dengan persyaratan berada pada ketinggian 25 mdpl (diatas permukaan laut). Ketentuan tersebut membuat ada dusun yang direlokasi dekat dengan perkampungan lama dan ada juga dusun direlokasi jauh dari perkampungan lama. Bagi dusun yang direlokasi dekat dengan perkampungan lama atau masyarakat yang memilih sendiri tempat relokasi, umumnya tidak mengalami kendala yang besar saat proses relokasi. Alasannya karena tempat mereka dipindahkan keadaan sosial dan lingkungannya tidak jauh berbeda dengan lingkungan sebelumnya. Adapun bagi dusun yang direlokasi jauh dari perkampungan lama, memunculkan persoalan tersendiri bagi masyarakatnya. Seperti yang dialami oleh masyarakat Dusun Sabeugunggung, Desa Betumonga, Kecamatan Pagai Utara.

Ada tiga dusun di Desa Betumonga yang terdampak langsung gempa bumi dan tsunami yaitu Dusun Muntei, Dusun Baru-baru dan Dusun Sabeugunggung. Ketiga dusun ini kemudian direlokasi oleh pemerintah ke Jl. Poros Pagai Utara. Dusun Sabeugunggung sendiri direlokasi jauh dari perkampungan lama. Jarak antara perkampungan lama dengan tempat relokasi berkisar 10 KM. Pada SK Bupati

Kabupaten Kepulauan Mentawai nomor 188.45-280 tahun 2010, jumlah masyarakat yang direlokasi dari Desa Betumonga terdiri dari 141 KK atau 215 orang pengungsi. Jumlah rumah yang akan dibangun di tempat relokasi sebanyak 141 buah rumah (Laporan BNPB dan BAPPENAS Kabupaten Kepulauan Mentawai 2011-2013). Sekitar 50 rumah dibangun untuk masyarakat Dusun Sabeugunggung.

Hasil kajian lapangan menunjukkan bahwa masyarakat yang direlokasi ke Jl. Poros Pagai Utara mengalami beberapa kendala dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Kendala utama mereka adalah kesulitan air bersih, sehari-hari mereka mengandalkan air hujan yang ditampung menggunakan wadah besar. Kesulitan air bersih ini dikarenakan sumber mata air yang disediakan terletak jauh dari pemukiman dan beberapa diantaranya tidak layak untuk dikonsumsi.

Kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari di huntap membuat masyarakat Sabeugunggung sering mengenang kehidupan di *laggai* dahulu. Kenangan terhadap *laggai* tersebut yaitu bagaimana *laggai* bisa mencukupi kebutuhan kehidupan mereka sehari-hari. Mereka tidak kesulitan air bersih, ikan yang melimpah serta keladi dan pisang yang murah mereka dapati di *laggai*. Oleh karena itu, untuk mengetahui pandangan masyarakat terkait relokasi bencana khususnya masyarakat huntap Sabeugunggung, Desa Betumonga, Kecamatan Pagai Utara diperlukan tulisan yang mampu mendeskripsikan kehidupan masyarakat pasca di relokasi.

Pentingnya tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat Mentawai terkait relokasi bencana khususnya masyarakat Dusun Sabeugunggung. Apakah benar menurut pemerintah setelah masyarakat dipindah dari pemukiman lama merasa lebih aman dari ancaman bencana dan kenapa masih ada masyarakat yang kembali ke perkampungan lama meskipun sudah ditetapkan menjadi kawasan rawan bencana.

B. Metode Penelitian

Penulisan ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Penulisan kualitatif membangun gambaran holistik yang kompleks; menganalisis kata-kata; menuliskan pandangan detail dari para partisipan; dan melaksanakan studi tersebut dalam lingkungan yang alami (John W Creswell, 2012). Pendekatan studi kasus dilakukan untuk melihat suatu kasus yang berkembang

dalam masyarakat dengan cara pengumpulan datanya secara detail dan mendalam (John W Creswell, 2012). Pendekatan ini membantu penulis agar fokus pada tema penulisan karena dibatasi oleh tempat dan waktunya lebih spesifik. Melalui studi kasus ini penulis mampu mendeskripsikan kenapa masyarakat Dusun Sabeugunggung yang telah direlokasi ke Jalan Poros Pagai Utara banyak yang bolak-balik ke kampung lama mereka.

Penelitian ini dilakukan di Dusun Sabeugunggung, Desa Betumonga, Kecamatan Pagai Utara. Dalam penelitian ini, pemilihan informan penelitian dilakukan dengan teknik purposive sampling (sampling bertujuan). *Purposive sampling* yaitu teknik penentuan informan dengan berbagai pertimbangan dan kriteria tertentu yang telah dirumuskan atau direncanakan sebelumnya (Sugiyono, 2011). Ada dua jenis informan dalam penulisan, pertama informan kunci, yaitu orang yang benar-benar paham dengan masalah penulisan, serta dapat memberikan penjelasan lebih lanjut tentang informasi yang diminta (Koentjaraningrat, 1990). Informan kunci yang dimaksud dalam tulisan ini adalah masyarakat huntap Sabeugunggung dengan kriteria: Masyarakat yang direlokasi menetap dan beraktivitas di lokasi relokasi, Masyarakat yang direlokasi ke huntap namun masih beraktivitas di perkampungan lama (bolak-balik), Minimal berumur 17 tahun saat tsunami melanda. Kedua informan biasa, adalah orang-orang yang mengetahui serta dapat memberikan informasi atau data yang bersifat umum dan terkait dengan permasalahan penulisan (Koentjaraningrat, 1990). Kriteria informan biasa dalam penulisan ini adalah: Pejabat Desa Betumonga, Kepala Dusun Sabeugunggung, Pemuka Agama, Relawan tsunami Mentawai 2010, Fasilitator Kebencanaan dari NGO, dan Masyarakat Huntap Sabeugunggung.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Studi Kepustakaan, Observasi Partisipatif, Wawancara Mendalam, *Life Story* (Riwayat Hidup), Dokumentasi, dan Analisis Data. Teknik pengumpulan data ini adalah agar bisa mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penulisan. Melalui kegiatan observasi, penulis bisa mendeskripsikan suatu kebudayaan atau memahami suatu pandangan dari sudut pandang masyarakat yang sedang diteliti. Menggunakan metode ini penulis dapat mengamati makna dan tindakan dari masyarakat mengenai kondisi mereka saat ini di lokasi relokasi. Penulis berharap mampu mendeskripsikan uraian

mendalam tentang ucapan, tulisan dan perilaku yang diamati dari individu, kelompok, masyarakat dan organisasi masyarakat yang dikaji. Tidak hanya melalui observasi partisipatif, metode lain yang digunakan yaitu *life story*. Akan tetapi menggunakan metode ini peneliti harus mampu membedakan mana yang pengetahuan dan mana yang *memori* informan. Hal itu karena sering terjadi peneliti sulit membedakan kedua hal tersebut. Pengetahuan didapatkan oleh seseorang melalui pewarisan budaya dalam masyarakatnya, namun jika pengetahuan yang diwariskan tersebut memberikan pengaruh terhadap perilaku sosialnya maka pengetahuan tersebut telah berubah menjadi *memory* (Sairin, 2006).

Sementara itu, proses analisis data dilakukan penulis untuk menyimpulkan data yang telah dikumpulkan selama di lapangan. Bogdan dalam (Sugiyono, 2011) menjelaskan analisis data yaitu mencari serta menyusun data hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain secara sistematis sehingga mudah dipahami, dan hasil temuan tersebut dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan sejak penulis berada di lapangan yaitu dengan cara mengelompokkan data yang telah penulis dapatkan di lapangan. Data tersebut penulis bagi menjadi data masyarakat yang menetap di huntap dan masyarakat yang bolak-balik ke kampung lama. Kemudian penulis juga melakukan pemilahan terhadap data tersebut agar sesuai dengan outline penulisan yang telah penulis siapkan sebelumnya. Terakhir baru penulis susun secara sistematis seperti mendeskripsikan, menyajikan data dalam bentuk tabel atau bagan, dan dokumentasi. Tujuannya agar data-data tersebut mudah dipahami oleh pembaca.

C. Pembahasan

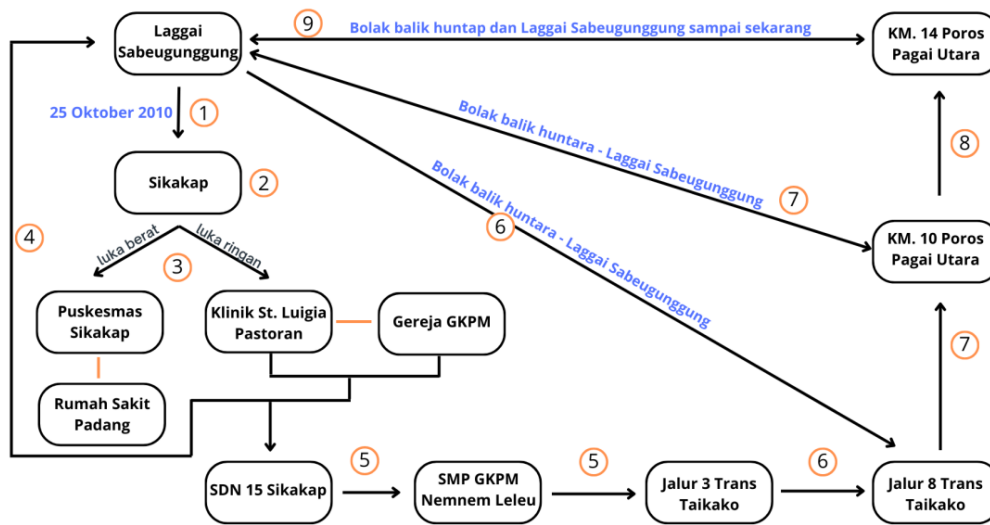
Masyarakat huntap Sabeugunggung tidak akan pernah melupakan kejadian kelam yang menimpa perkampungan mereka. Kejadian gempa bumi dan tsunami yang terjadi pada tanggal 25 Oktober 2010, sekitar jam 21.45 WIB tersebut telah menghancurkan dan meluluhlantakkan perkampungan mereka. Perkampungan yang telah dibangun dan dihuni oleh beberapa generasi seketika hancur dan rata dengan tanah ketika gelombang air laut menghantamnya. Mereka tidak akan pernah menyangka laut yang selama ini bersahabat dengan mereka, malam itu bergemuruh mengeluarkan gelombang tsunami.

Akibat gempa bumi yang menghasilkan gelombang tsunami yang besar tersebut, masyarakat Sabeugungung kehilangan banyak sanak saudara mereka dan menyisakan trauma mendalam hingga saat sekarang ini. Akibat bencana gempa bumi dan tsunami tersebut, masyarakat Sabeugungung dipindahkan dari kampung mereka, ikut program relokasi pemerintah. Relokasi pemukiman tidak hanya dilakukan di Sabeugungung, tapi di berapa dusun yang terkena dampak langsung dari tsunami pada tahun 2010.

Selain itu, program relokasi ini ditujukan tidak hanya sebagai bagian dari upaya rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana, namun juga sebagai upaya percepatan pembangunan masyarakat untuk mengeluarkan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai daerah tertinggal. Seperti yang ditulis dalam Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Serta Percepatan Pembangunan Wilayah Kepulauan Mentawai menyebutkan akibat dari gempa dan tsunami yang melanda Kabupaten Kepulauan Mentawai, diperkirakan akan menambah jumlah penduduk miskin sebanyak 16,28% (Laporan BNPB dan BAPPENAS Kabupaten Kepulauan Mentawai 2011-2013).

Oleh karena itu pemilihan titik relokasi tidak hanya memindahkan masyarakat dari kawasan bencana, tetapi juga untuk membangun dan mengintegrasikan antar dusun dan desa. Tujuannya agar memudahkan pemerintah dalam menjangkau masyarakat untuk dapat merealisasikan program-program kemasyarakatan. Bagi masyarakat huntap Sabeugungung, akibat dari bencana gempa dan tsunami tersebut, mereka telah dipindahkan beberapa kali oleh pemerintah. Semenjak mereka pertama kali ditemukan oleh relawan sampai mereka tinggal di huntara bertahun-tahun dan akhirnya mendapatkan huntap.

Secara umum waktu masyarakat menempati suatu tempat ketika dipindah-pindahkan oleh pemerintah berbeda-beda. Alur yang dilewati oleh masyarakat huntap Sabeugungung secara garis besar dapat dilihat pada bagan berikut:



Keterangan:

1. Gempa bumi dan tsunami yang melanda Laggai Sabeugungung pada tanggal 25 Oktober 2010
2. Semua masyarakat Dusun Sabeugungung yang ditemukan selamat, dibawa ke Sikakap untuk diperiksa kesehatan mereka dan dilakukan pengobatan jika ada yang luka-luka
3. Masyarakat yang luka-luka dibagi menjadi luka berat di Pusekesmas Sikakaap dan luka ringan di Aula GKPM maupun Klinik St. Luigia Pastoran
4. Masyarakat yang mengalami luka ringan, setelah sembuh ada yang kembali ke *Laggai* Sabeugungung dan tinggal di tenda pengungsian
5. Masyarakat yang melakukan perawatan dan pengobatan di Gereja GKPM maupun di Klinik Santa Agnesia Pastoran, kemudian di pindahkan ke SDN 15 Sikakap, maupun langsung ke SMP GKPM Nemnem Leleu dan terakhir di Jalur 3 Trans Taikako
6. akhir tahun 2011, masyarakat Dusun Sabeugungung di pindahkan kembali ke jalur 8 dan diberikan huntara per KK, termasuk masyarakat yang telah kembali ke *Laggai* Sabeugungung mereka kembali untuk menerima huntara
7. Setelah satu tahun lebih berada di huntara, masyarakat Dusun Sabeugungung di pindahkan kembali ke KM. 10 Jalan Poros Pagai Utara namun masih menempati huntara
8. Pertengahan tahun 2014, masyarakat Sabeugungung telah mendapatkan kepastian pembangunan huntap di KM.14
9. Masyarakat Dusun Sabeugungung saat ini di KM. 14, masih bolak balik *Laggai* Sabeugungung ke huntap untuk mengolah lahan maupun menangkap ikan untuk memenuhi ekonomi rumah tangga mereka

Gambar 1. Skema Relokasi Masyarakat Huntap Sabeugungung

Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber, 2022

Skema diatas merupakan alur perpindahan yang dilakukan oleh masyarakat huntap Sabeugugung sampai mendapatkan huntap. Bagan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, setelah gempa dan tsunami melanda pada tanggal 25 Oktober 2010, pada tanggal 27 Oktober 2010 relawan sampai di *Laggai* Sabeugungung dan menemukan beberapa kelompok masyarakat. Setiap kelompok masyarakat yang ditemui kemudian dibawa ke Sikakap untuk diperiksa kesehatan mereka lebih lanjut dan pengobatan bagi seluruh korban. Sampai di Sikakap, masyarakat Sabeugungung dibawa ke dua tempat, ada yang dibawa ke Aula GKPM Sikakap dan ada yang ke Klinik St. Luigia di area Pastoran Sikakap. Kedua tempat

tersebut dijadikan sebagai posko kesehatan bagi seluruh korban bencana gempa dan tsunami Mentawai di Pulau Pagai Utara dan Pulau Pagai Selatan. Sedangkan Puskesmas Sikakap digunakan untuk para korban yang luka parah, atau tempat bagi korban yang harus dirujuk ke Rumah Sakit di Padang.

Bagi korban yang dirawat di Aula GKPM, Klinik St. Luigia dan Puskesmas Sikakap, jika kesehatannya sudah berangsur pulih kemudian di pindahkan ke SDN 15 Sikakap. Tujuan pemindahan tersebut supaya menghindari munculnya penyakit baru di tempat tersebut. Hal itu mengingat karena banyaknya jumlah pasien dengan kondisi yang beragam, ruang yang terbatas serta peralatan yang juga tidak memadai. Namun ada juga masyarakat yang mengalami luka ringan, setelah sembuh mereka kembali ke *Laggai* Sabeugunggung dan tinggal di tenda pengungsian yang didirikan dekat pemukiman lama.

Setelah dari SDN 15 Sikakap, kemudian masyarakat Sabeugunggung kembali dipindahkan ke SMP GKPM di Nemnem Leleu. Saat di pindahkan ke SMP Nemnem Leleu ini sekitar awal tahun 2011. Masyarakat ditempati di ruang-ruang kelas maupun tenda-tenda barak yang didirikan di halaman sekolah. Setelah itu dipindahkan kembali ke Jalur 3 Trans Taikako sekitar pertengahan tahun 2011. Masyarakat yang dipindahkan ke Jalur 3 ini masih menempati tenda-tenda. Saat di Jalur 3 ini masyarakat Sabeugunggung bergabung dengan masyarakat yang berasal dari 3 desa yaitu, Desa Taikako, Desa Betumonga dan Desa Silabu. Tenda tersebut didirikan tidak jauh dari SMAN 2 Pagai Utara Selatan saat ini.

Sekitar 8-10 bulan berada di Jalur 3 Trans Taikako, atau sekitar bulan November 2011. Masyarakat Sabeugunggung kembali dipindahkan ke Jalur 8 di Rimba Jaya disana masyarakat Sabeugunggung beserta pengungsi dari dusun lainnya tidak lagi tinggal di tenda, melainkan mereka telah mendapatkan huntara. Huntara tersebut berukuran 6x6 meter, dengan dinding triplek yang terdiri dari satu kamar dan satu ruangan lepas. Sedangkan untuk MCK-nya didirikan WC umum dan untuk makan masih menggunakan dapur umum. Beberapa masyarakat Sabeugunggung yang telah kembali ke *laggai* mereka, juga kembali ke Jalur 8 untuk mengambil bantuan huntara mereka. Memang semenjak berada di Jalur 3, sudah banyak masyarakat yang telah pulih luka-lukanya kembali ke *laggai* untuk menata kembali kehidupan mereka, seperti mengerjakan ladang. Hal ini karena sudah

hampir satu tahun setelah tsunami melanda, tapi nasib mereka belum jelas saat itu. Oleh karenanya banyak masyarakat yang telah pulih secara fisik, memilih kembali ke kampung lama, baik yang menetap di kampung lama atau mereka yang bolak-balik ke huntara.

Lebih kurang satu tahun di Jalur 8, pada akhir tahun 2012 masyarakat Sabeugunggung kembali dipindahkan ke KM. 10 atau kawasan huntap Baru-baru saat ini. Pemandangan masyarakat Sabeugunggung ini dipengaruhi dengan mencuatnya kembali isu pemberian huntap bagi masyarakat yang terdampak tsunami dan perkampungan mereka di relokasi. Akan tetapi, setelah di pindahkan ke KM. 10, masyarakat Sabeugunggung harus menunggu hampir selama satu setengah tahun sampai pada pertengahan tahun 2014, dan pembangunan huntap dicairkan ke rekening Pokmas penerima bantuan huntap.

Adapun dana huntap telah dicairkan pada pertengahan 2014, namun masyarakat Sabeugunggung yang telah mengetahui lokasi tempat mereka dipindahkan berangsur-angsur membongkar huntara mereka di KM. 10 dan membawanya dengan jalan kaki ke KM. 14. Mereka mendirikan huntara persis di belakang bangunan huntap mereka saat ini. Mereka menunggu di sana sampai pada akhirnya dana pembangunan huntap tahap pertama cair. Meskipun dana huntap telah dicairkan, masyarakat harus menunggu lama sampai pembangunan huntap selesai. Salah satunya ketersediaan kayu yang menjadi polemik pada saat itu. Akibatnya pembangunan huntap tertunda beberapa bulan karena masyarakat Dusun Sabeugunggung harus menunggu kayu dari Koperasi Primkopad Korem 032 Wirabraja yang telah ditunjuk sebagai penyedia kayu untuk huntap.

Huntap masyarakat Sabeugunggung selesai dibangun sekitar akhir 2015. Huntap tersebut langsung ditempati warga sampai saat sekarang ini. Bahkan sudah ada beberapa huntap yang telah direnovasi oleh masyarakat Sabeugunggung seperti menambah jumlah kamar maupun memperluas ukuran rumah. Meskipun demikian, sampai saat sekarang ini, masih banyak masyarakat huntap Sabeugunggung yang bolak-balik ke *laggai* mereka untuk mengerjakan ladang maupun menangkap ikan.

Sinaga (2013) mengatakan upaya pemulihan masyarakat pasca bencana merupakan persoalan yang sangat rumit dan kompleks, selain mengenai isu pemulihannya yang sangat luas, namun lembaga yang terlibat juga sangat banyak.

Perubahan-perubahan yang telah direncanakan pemerintah terhadap masyarakat yang direlokasi di Dusun Sabeugunggung tidak semua dapat diterima dan berjalan lancar. Kluckhohn, dalam (Suparlan, 1996) menyatakan bahwa kebudayaan itu telah mengakar dalam kehidupan seseorang maupun kehidupan sosialnya, dan kebudayaan tidak dapat dipaksakan kehadirannya. Kendala-kendala yang dihadapi masyarakat di tempat relokasi tersebut sepertinya luput dari perhatian pemerintah. Setelah bertahun-tahun menempati lokasi relokasi dengan berbagai kendala yang dihadapi, muncul pandangan masyarakat terhadap program relokasi dan alasan mereka pindah atau tetap bertahan di sana.

Di sisi yang lain, meskipun mereka berada pada suatu lingkungan yang sama, akan tetapi mereka memiliki variasi tindakan yang berbeda dalam masyarakat itu sendiri. Perbedaan pandangan dalam masyarakat itu melahirkan pola hubungan antara manusia dan lingkungan yang terkadang dianggap tidak sesuai oleh pemilik kebudayaan yang lain (Arifin, 2015). Boen & Jigyansu, dalam (Martanto & Sagala, 2014) mengutarakan jika relokasi bukan hanya melibatkan keluarga atau manusia saja, akan tetapi berhadapan dengan masalah utama yaitu “memindahkan jalan hidup” manusia yang mencakup tempat kerja atau sumber perekonomian, tempat bermain dan fungsi sosial lain yang telah menjadi bagian dalam masyarakat. Sebelum mengambil relokasi sebagai bagian dari rehabilitasi pasca bencana, sangat disarankan untuk memahami masyarakat target relokasi. Tujuannya untuk mempelajari sejarah pemukiman masyarakat, asal-usul masyarakat dan kebudayaan mereka.

D. Kesimpulan

Bencana gempa bumi dan tsunami Mentawai 2010 pada tahun ini hampir memasuki tahun ke 12. Akan tetapi upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah direncanakan pemerintah terhadap para korban dengan cara merelokasi dan pembangunan huntap bagi mereka yang terdampak belum menampilkan hasil yang maksimal. Upaya percepatan pembangunan agar mengeluarkan Kabupaten Mentawai sebagai daerah tertinggal juga masih belum menampakkan hasilnya hingga saat ini. Seperti halnya kondisi kehidupan masyarakat huntap

Sabeugungung yang saat ini masih belum bisa bangkit sepenuhnya setelah gempa bumi dan tsunami melanda *laggai* mereka.

Masyarakat huntap Sabeugungung yang kemudian direlokasi ke KM. 14, sudah mengalami beberapa kendala semenjak di berada di tenda pengungsian, huntara hingga di huntap saat ini. Kendala yang mereka alami seperti kesulitan air bersih, sarana dan prasarana yang kurang memadai dan masih bergantung dengan perekonomian di *laggai*. Pengalaman budaya masyarakat huntap Sabaugungung terhadap program relokasi yang mereka terima juga mempengaruhi bagaimana kehidupan mereka saat ini. Seperti masyarakat yang memilih menetap di huntap, atau mereka yang bolak-balik *laggai*-huntap. Meskipun dalam masyarakat tersebut mereka memiliki alasan yang berbeda-beda kenapa mereka bolak-balik dan mereka menetap. Tetapi semua itu berdasarkan apa yang telah mereka lalui sebelum tsunami, saat tsunami melanda, tinggal di tenda pengungsian, tinggal di huntara dan mendapatkan huntap di KM. 14.

Pandangan masyarakat huntap Sabeugungung yang memilih menetap di huntap ada yang didasari oleh rasa takut dan rasa trauma akibat pernah tergulung langsung oleh gelombang tsunami. Ada juga mereka yang memilih menetap di huntap dikarenakan telah mempunyai pekerjaan baru sehingga tidak perlu lagi kembali ke *laggai*. Akan tetapi, tidak semua masyarakat yang menetap di huntap Sabeugungung setuju kalau di KM. 14 sudah tepat untuk dijadikan lokasi relokasi. Ada yang berpendapat jika relokasi tidak perlu dilakukan sejauh ini, cukup direlokasi di dekat *laggai* mereka. Sama halnya dengan pandangan masyarakat huntap Sabeugungung yang memilih bolak-balik didasari oleh alasan yang berbeda-beda. Ada yang mereka memilih bolak-balik karena himpitan perekonomian yang mengharuskan untuk kembali ke *laggai*. Meskipun saat kembali tersebut mereka masih mengalami ketakutan dan rasa trauma, tetapi karena di huntap mereka tidak mempunyai pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Selain itu, ada yang memilih bolak-balik *laggai* memberikan pandangan bahwa mereka lebih senang menetap di *laggai* jika di dibandingkan menetap di huntap. Menetap di huntap mereka merasa lebih susah untuk melakukan aktivitas sehari-hari mereka. Jika berada di *laggai* untuk memenuhi kebutuhan air bersih ada

sungai besar dengan air yang jernih yang bisa mereka gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Begitu juga untuk yang bisa mereka makan di *laggai*, mereka tidak perlu membeli apa yang mereka ingin makan, karena disana sudah tersedia keladi, pisang dan juga ikan yang banyak di sungai maupun di laut mereka.

Daftar Pustaka

- Arifin, Z. (2015). POLITIK EKOLOGI: Ramah Lingkungan Sebagai Pembeneran. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 1(1).
<https://doi.org/10.22202/mamangan.v1i1.88>
- Hadi, I. P. (2018). DINAMIKA PADA PERMUKIMAN RELOKASI TURGO DI DUSUN SUDIMORO. *Jurnal Arsitektur KOMPOSISI*, 12(1), 77.
<https://doi.org/10.24002/jars.v12i1.1648>
- John W Creswell. (2012). Penelitian Kualitatif dan Desain Riset Memilih diantara lima pendekatan. In *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Koentjaraningrat, K. P. H. (1990). *Pengantar Ilmu Antropolog,(Introduction to Anthropology)* (PT Rineka Cipta (ed.)).
- Martanto, F., & Sagala, S. A. H. (2014). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persoalan Relokasi Pasca Bencana Lahar Dingin di Kali Putih (Studi Kasus Dusun Gempol, Desa Jumoyo, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang). *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota B SAPPK*, 3, 69–82.
- Sairin, S. (2006). Yang Diingat dan Dilupakan, Yang Teringat dan Terlupa: Social Memory dalam Studi Antropologi. In *Esei-Esei Antropologi: Teori, Metodologi & Etnografi*.
- Sinaga, L. C. (2013). Problematika Rehabilitasi dan Rekonstruksi Studi Kasus Pasca Bencana Tsunami Mentawai 2010. *Jurnal Penanggulangan Bencana*, 4(1), 27–38.
- Sugiyono, P. (2011). *Metodologi penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suparlan, S. (1996). *Manusia, Kebudayaan, dan Lingkungan*. Raja Grafindo Persada.